

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan pembangunan dibidang ekonomi kerakyatan sebagai upaya meningkatkan pendapatan masyarakat Bandar lampung, telah ditempuh berbagai terobosan antara lain melalui pemberdayaan UKM dan Koperasi serta pemberian bantuan modal bergulir. Keberadaan perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah (KUKM) diharapkan bisa berperan dalam menumbuhkan sector perekonomian daerah melalui pengembangan sistem ekonomi kerakyatan, sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi jumlah kemiskinan.

Peranan Usaha Kecil Mikro (UKM) di kota Bandar lampung memang diakui sangat penting didalam perekonomian masyarakat kota Bandar lampung, terutama dalam aspek aspek, seperti peningkatan jumlah angkatan kerja, peningkatan produk domestik regional bruto, dan peningkatan ekspor non migas. Telah banyak usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam membantu perkembangan usaha kecil melalui berbagai macam program pengembangan atau pembinaan usaha kecil yang salah satunya melalui peraturan

Bank Indonesia (PBI) Nomor 3/2/PBI/2001 tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil yang pokok-pokonya meliputi :

- (i) Bank dianjurkan menyalurkan dananya melalui pemberian KUK,
- (ii) Bank wajib mencantumkan rencana pemberian KUK dalam rencana kerja anggaran tahunan (RKAT),
- (iii) Bank wajib mengumumkan pencapaian pemberian KUK kepada masyarakat melalui laporan keuangan publikasi,
- (iv) Plafon KUK disesuaikan menjadi Rp 500.000.000, per nasabah,
- (v) Bank yang menyalurkan KUK dapat meminta bantuan teknis dari Bank Indonesia, dan
- (vi) Pengenaan sanksi dan insentif dalam rangka pencapaian kewajiban KUK dihapuskan.

(Tiktik SP dan Abd. Rachman S, 2002, 33)

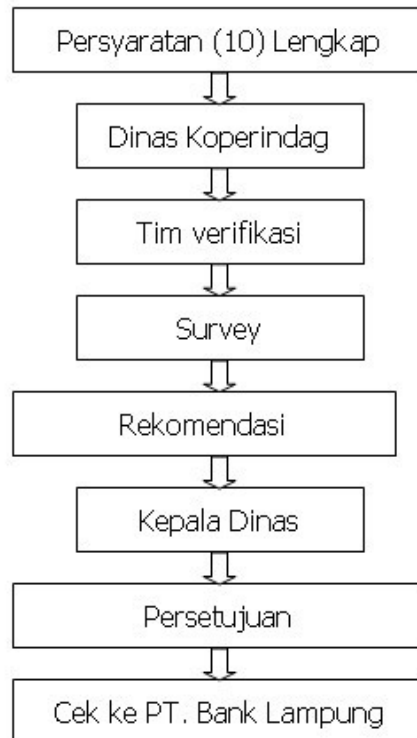
Melalui peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 3/2/PBI/2001 tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Koperasi memberikan pinjaman dana perkuatan modal Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau Usaha Kecil Mikro (UKM). Sumber dana pinjaman ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi. Persyaratan pencairan dan pinjaman APBD Propinsi Lampung Tahun 2003 adalah sebagai berikut:

1. Proposal yang telah disempurnakan (kegiatan usaha, ijin, agunan)
2. Jaminan asli yang dilengkapi dengan tafsiran nilai (untuk tanah dan bangunan dilampirkan copy pembayaran PBB)
3. Surat pernyataan atau surat kuasa penyerahan jaminan (bermeterai Rp 6.000)
4. Rekomendasi dari Dinas/Instansi Pembina

5. Copy surat-surat ijin usaha yang dimiliki
6. Copy rekening PT. Bank Lampung (selanjutnya disebut Bank Lampung) terdekat dengan domisili LKM/UKM dan BMT (Baitul Maal wat Tamwil)
7. Kuitansi (bermeterai Rp 6.000)
8. Berita Acara penyerahan pinjaman
9. Khusus untuk Koperasi dan BMT dan LKM:
 - " Copy anggaran dasar dan rumah tangga
 - " Badan hukum/surat keterangan pendirian
 - " Susunan pengurus dan pengawas
 - " Daftar anggota calon peminjam
10. Dibuat rangkap 2 dan dimasukkan dalam stop map folio
 - " BMT: warna hijau
 - " LKM/UKM: warna kuning

Gambar 1 menunjukkan alur prosedur kredit LKM/UKM dan BMT. Setelah syarat 1-10 dilengkapi oleh calon debitur maka diserahkan ke Dinas Koperindag, Propinsi Lampung. Dokumen persyaratan tersebut akan dinilai oleh tim verifikasi dan selanjutnya akan diikuti dengan kunjungan lapangan. Apabila memenuhi syarat, maka tim verifikasi akan merekomendasikan kepada Kepala Dinas. Persetujuan pemberian kredit selanjutnya ditentukan oleh Kepala Dinas dengan mendengarkan masukan dari tim verifikasi. Cek akan diberikan kepada debitur dengan membawa persyaratan asli. Cek dapat dicairkan di Bank Lampung.

Gambar 1. Proses Persetujuan Kredit



Sumber : SIPUK BI

Tim verifikasi menilai kelayakan usaha dengan memperhatikan beberapa variabel yang masing-masing variabel memiliki bobot, yaitu: kelembagaan (bobot 20%), peluang usaha (bobot 10%), rencana dan pemanfaatan dana (bobot 10%), operasional usaha (20%), permodalan usaha dan jaminan (bobot 20%) dan kemampuan membayar (20%).

Disperindag dan koperasi kota Bandar Lampung mencatat perkembangan UKM pada tahun 2002 - 2009 meningkat dari 77,817 unit menjadi 109,201 unit. Dari data tersebut, usaha kecil menengah kota Bandar Lampung mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 4,55%. Perkembangan jumlah UKM di Kota Bandar Lampung dari tahun 2002 - 2009 dapat dilihat pada table 1.

Tabel 1. Perkembangan Jumlah UKM Kota Bandar Lampung Tahun 2002 - 2009

Tahun	Jumlah UKM (Unit)	Pertumbuhan (%)
2002	77,817	0
2003	82,258	4,44
2004	86,370	4,11
2005	90,917	4,54
2006	95,421	4,50
2007	101,786	6,36
2008	105,046	3,26
2009	109,201	4,15
Rata-Rata		4,55

Sumber : Dinas Koperasi, UKM. Perindag Kota Bandar Lampung

Berdasarkan data dari disperindag kota Bandar Lampung, dikatakan bahwa sebagian besar UKM mengalami kesulitan modal, sehingga sebagian besar besar UKM menginginkan kucuran kredit untuk modal kerja mereka sehingga mereka dapat meningkatkan produktifitas usaha mereka.

Jumlah unit usaha merupakan banyaknya satuan usaha yang dimiliki. Sumber modal usaha merupakan salah satu faktor internal yang mempengaruhi perkembangan UKM. Sumber modal usaha UKM dapat berasal dari modal sendiri maupun modal pinjaman dari bank. Dinas Koperasi, UKM. Perindag kabupaten / kota Bandar Lampung 2009 mencatat, total modal usaha dari 109,201 unit UKM mencapai 15% yang menggunakan pinjaman dari program KUK(perbankan), 28% menggunakan pinjaman dari program non KUK (lembaga kredit non bank) seperti dari rentenir, keluarga, koperasi, dll selebihnya yaitu sekitar 37% yang memiliki modal sendiri. Jumlah unit usaha dapat mempengaruhi permintaan kredit UKM, dimana semakin banyak jumlah unit usaha kecil dan menengah yang beroperasi, maka permintaan akan kredit cenderung semakin meningkat dengan asumsi jumlah kredit usaha kecil yang terdapat di bank terbatas sedangkan jumlah unit

usaha kecil semakin meningkat. Untuk mengetahui perkembangan jumlah alokasi KUK yang terdapat di Bank Pembangunan Daerah Lampung, dapat di lihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Perkembangan Jumlah Alokasi Kredit Usaha Kecil Di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Lampung Tahun 2002 - 2010

Tahun	KUK (Juta Rp)
2002	13,355
2003	15,420
2004	17,053
2005	17,392
2006	20,367
2007	29,966
2008	30,231
2009	37,314

Sumber : Laporan Keuangan BI

Tingkat suku bunga merupakan harga dari penggunaan uang atau bias juga dipandang sebagai sewa atas penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Tingkat suku bunga pinjaman dapat berpengaruh terhadap permintaan kredit oleh UKM. Tingkat suku bunga kredit yang tinggi cenderung akan membuat permintaan kredit UKM menurun, dan sebaliknya jika tingkat suku bunga kredit turun akan membuat permintaan kredit UKM naik. Hal ini dikarenakan tingkat suku bunga kredit akan mempengaruhi tingkat pengembalian pinjaman oleh UKM. Namun menurut *partono & Rachman, 2000* para pengusaha kecil dan menengah yang meminjam kredit untuk usahanya tidak mempersoalkan tingkat suku bunga pinjaman. Untuk mengetahui perkembangan tingkat suku bunga pinjaman kredit usaha kecil dapat di lihat pada Tabel 3.

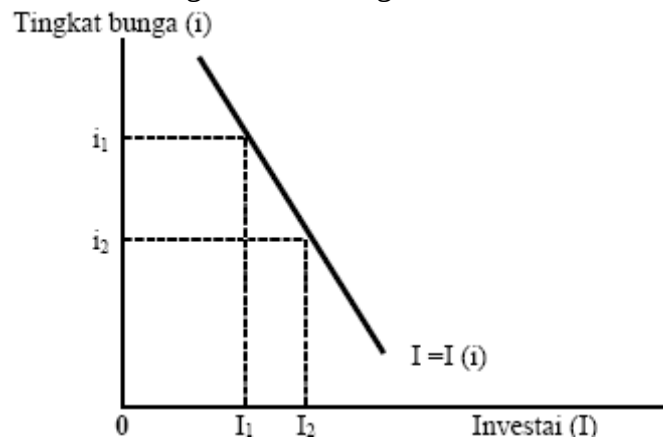
Tabel 3. Tingkat Bunga Kredit Usaha Kecil BPD di kota Bandar Lampung Tahun 2002 - 2009

Tahun	Tingkat Suku Bunga (%)
2002	17,84
2003	15,93
2004	13,71
2005	14,05
2006	15,97
2007	14,21
2008	14,05
2009	12,41

Sumber : Laporan Keuangan BI

Para ahli ekonomi Neo Klasik menjelaskan bahwa dalam hal investasi, maka tingkat suku bunga merupakan faktor penentu bagi naik turunnya suatu investasi. Jika tingkat suku bunga naik maka investasi akan turun, sebaliknya jika suku bunga turun, maka investasi akan naik. Secara grafik, hubungan antara investasi dan tingkat bunga dapat dilihat pada Gambar 1. Pada Gambar 1 terlihat bahwa apabila tingkat bunga turun misalnya dari i_1 ke i_2 akan menyebabkan permintaan investasi meningkat dari I_1 ke I_2 , dan demikian pula sebaliknya bila tingkat bunga yang berlaku mengalami kenaikan misalnya dari i_2 menjadi i_1 , maka permintaan investasi akan menurun dari I_2 menjadi I_1 .

Gambar 2. Tingkat Suku Bunga Dan Investasi



Sumber : Muana Nanga, 2001

Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata – rata penduduk di suatu daerah. Tingkat pendapatan ini sering dihubungkan dengan standard kehidupan umum yang berlaku didalam masyarakat. Seseorang yang memiliki pendapatan yang relatif tinggi mudah mencukupi kebutuhan hidupnya serta menikmati kemewahan. Jadi Tidaklah mengherankan jika orang yang memiliki pendapatan yang tinggi menikmati standard hidup yang tinggi pula.

Pendapatan perkapita dapat mempengaruhi permintaan kredit oleh UKM dimana jika pendapatan masyarakat naik, maka konsumsi masyarakat akan naik, sehingga ini memicu para pengusaha kecil menengah untuk meningkatkan produksinya, yang mana peningkatan produksi usaha membutuhkan tambahan modal, sehingga para pengusaha akan cenderung meminjam pinjaman untuk modal peningkatan usahanya. Untuk melihat tingkat pendapatan perkapita kota Bandar Lampung, dapat dilihat dari table 3.

Tabel 4. Pendapatan Perkapita Kota Bandar Lampung Tahun 2002-2009

Tahun	Pendapatan Per Kapita
2002	6,215,785
2003	7,065,782
2004	7,605,819
2005	8,561,475
2006	10,421,955
2007	12,868,253
2008*	15,771,680
2009**	19,383,401

Sumber : *Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung*
 Ket : *) *Angka Diperbaiki* **) *Angka Sementara*

Oleh Karena itu, maka dengan adanya peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 3/2/PBI/2001 diharapkan UKM di kota Bandar Lampung dapat mengatasi masalah permodalan yang sebagian besar dihadapi oleh UKM, serta dapat mengembangkan usahanya.

Dari uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk menganalisis mengenai pertimbangan permintaan kredit oleh UKM, yang banyak didasarkan atas pertimbangan mengenai tingkat suku bunga pinjaman bank/kredit, pendapatan per kapita, dan jumlah unit usaha. Kesemuanya akan diangkat dalam skripsi berjudul “*Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Kredit UKM Di Bandar Lampung periode 2004-2009*”

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimanakah Pengaruh Pendapatan Perkapita, Jumlah Unit Usaha, dan tingkat suku bunga pinjaman terhadap Permintaan Kredit Usaha Kecil (KUK) di Bandar Lampung.

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk menghitung bagaimanakah pengaruh Pendapatan, Per Kapita, Jumlah Unit Usaha dan tingkat suku bunga pinjaman terhadap permintaan kredit usaha kecil menengah di Bandar Lampung.

1.4.Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis dapat digunakan untuk menambah pengetahuan mengenai Pengaruh, Pendapatan Per Kapita, Jumlah Unit dan Tingkat Suku Bunga pinjaman terhadap permintaan kredit usaha kecil menengah di Bandar Lampung.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan sumber informasi bagi pembaca yang memerlukannya.

1.5. Kerangka Pemikiran

KUK adalah kredit atau pembiayaan dari bank untuk investasi dan atau modal kerja, yang diberikan dalam rupiah dan atau valuta asing kepada nasabah usaha kecil dengan plafond kredit keseluruhan maksimal Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk membiayai usaha yang produktif.

Secara garis besar fungsi kredit dalam perekonomian, perdagangan dan keuangan adalah sebagai berikut: (1) meningkatkan daya guna (utility) dari uang, (2) meningkatkan daya guna (utility) dari barang, (3) meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, (4) sebagai salah satu alat stabilisasi ekonomi, (5) akan menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat, (6) sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional, dan (7) sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

Pertimbangan pengusaha untuk mengambil kredit usaha kecil tidak terlepas dari faktor-faktor tingkat suku bunga kredit, pendapatan yang mereka peroleh dan juga jumlah unit usaha yang mereka miliki.

Tingkat suku bunga kredit dapat berpengaruh permintaan kredit oleh UKM. Tingkat suku bunga kredit yang tinggi cenderung akan membuat permintaan kredit UKM menurun, dan sebaliknya jika tingkat suku bunga kredit turun akan membuat permintaan kredit UKM naik. Hal ini dikarenakan tingkat suku bunga kredit akan mempengaruhi tingkat pengembalian pinjaman oleh UKM.

Pendapatan perkapita dapat mempengaruhi permintaan kredit oleh UKM dimana jika pendapatan masyarakat naik, maka konsumsi masyarakat akan naik, sehingga ini memicu para pengusaha kecil menengah untuk meningkatkan produksinya, yang mana peningkatan produksi usaha membutuhkan tambahan modal, sehingga para pengusaha akan cenderung meminjam pinjaman untuk modal peningkatan usahanya.

Sumber modal usaha merupakan salah satu faktor internal yang mempengaruhi perkembangan UKM. Sumber modal usaha UKM dapat berasal dari modal sendiri maupun modal pinjaman dari bank. Untuk modal usaha yang berasal dari bank, pemilik UKM tentunya memperhatikan jumlah unit usaha yang beroperasi. Semakin banyak jumlah unit usaha yang dimiliki, maka permintaan kredit usaha cenderung akan naik.

1.6. Hipotesis

Diduga bahwa pendapatan per kapita, dan jumlah unit usaha berpengaruh positif terhadap permintaan kredit usaha kecil di Bandar Lampung, sedangkan tingkat suku bunga berpengaruh negatif terhadap permintaan kredit usaha kecil di Bandar Lampung.